

PEMILIH MUDA DI SULAWESI TENGAH MENYONGSONG PEMILU 2014

1

Oleh: *Irwan Waris*¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban perihal penanganan pemilih muda dan mengetahui peran agen sosialisasi politik (pendidikan politik) atas penanganan pemilih muda sehingga mereka mau berpartisipasi sebagai pemilih pada Pemilu tahun 2014 (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden). Penelitian ini diselenggarakan di Prov. Sulawesi Tengah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan penanganan pemilih muda menyongsong Pemilu 2014, khususnya yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu, belum sepenuhnya dilakukan secara baik, yaitu terencana, terstruktur, dan massif. Sedangkan agen sosialisasi politik yang melaksanakan pendidikan politik di dalam masyarakat, juga belum sepenuhnya menjalankan perannya memberikan pemahaman dan pengetahuan politik kepada pemilih muda.

Kata kunci: pemilih muda, pemilu, partisipasi politik, dan sosialisasi politik.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) pada Negara yang menjalankan prinsip demokrasi yang dituntun oleh prinsip-prinsip *rule of law*, adalah hal yang mutlak dilaksanakan. Melalui Pemilu kedaulatan rakyat sebagai salah satu prinsip demokrasi yang paling agung, dioperasionalkan. Melalui Pemilu yang jujur, adil, bersih dan bermartabat, rakyat mendelegasikan kedaulatannya kepada segelintir orang yang dipercayainya untuk menjadi pemimpin pada kurun waktu lima tahun pada tiga cabang kekuasaan (terutama legislatif dan eksekutif), yang diharapkan dapat menghadirkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan. Menurut Henry B. Mayo (dalam Budiardjo. 1986), dengan adanya Pemilihan Umum maka salah satu nilai demokrasi dapat terwujud, artinya terjadi perpindahan kekuasaan negara dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru secara damai.

Pemilih muda sebagai bagian dari rakyat Indonesia wajib dijadikan sebagai focus perhatian bagi penyelenggara Pemilu. Sebab, pada umumnya mereka baru pertama kali mengikuti Pemilu sehingga rentan terhadap berbagai aktifitas politik negatif yang sangat mungkin menghambat atau meminggirkannya dalam kontestasi Pemilu (baik sebagai pemilih maupun sebagai pihak yang potensial untuk dipilih). Pemilih muda ini, keberadaannya tersebar di seantero negeri, mulai dari dusun yang nun jauh dari hiruk pikuk perkotaan, perdesaan, dan di wilayah perkotaan. Mereka yang bermukim

¹ Penulis adalah Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UNTAD dan Lektor Kepala Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAD.

di wilayah yang jauh yakni perdesaan dengan akses terbatas baik transportasi maupun komunikasi, paling rentan terabaikan. Bahkan mereka yang bertempat tinggal di wilayah yang relative baik aksesnya, tidak menutup kemungkinan mereka abai terhadap berbagai informasi Pemilu yang boleh jadi disebabkan karena factor penyelenggara Pemilu, efek politisasi partai politik, dan ketidaktahuan tentang perlunya mereka ikut Pemilu.

Pemilih muda menurut hasil pertemuan para pemerhati Pemilu yang diprakarsai oleh *Center for Election and Political Party (CEPP)* di Pekanbaru, tgl. 13 s.d. 15 September 2013, adalah pemilih (orang yang memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum) yang berusia antara 17 hingga 29 tahun. Berdasarkan pengertian ini, jelas terbayang betapa besarnya jumlah pemilih muda ini. Di Sulawesi Tengah dengan mengutak-ngatik data BPS, diestimasikan jumlah pemilih muda di wilayah ini sebesar 680.352 jiwa (BPS, 2012). Jumlah ini cukup signifikan menentukan pemimpin berkualitas jika mereka memahami esensi Pemilu, khususnya pentingnya memajukan bangsa, menghadirkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan melalui pengelolaan Negara pada suatu *frame* sistem politik yang demokratis.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan rangkaian uraian di atas dapat dikemukakan rumusan penelitian ini, yaitu bagaimana penanganan pemilih muda dan siapakah pihak yang bertanggung jawab atas penanganan pemilih muda sehingga mereka sepenuhnya dapat berpartisipasi sebagai pemilih pada Pemilu tahun 2014.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban perihal penanganan pemilih muda dan mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas penanganan pemilih muda sehingga mereka mau berpartisipasi sebagai pemilih pada Pemilu tahun 2014 (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan focus pemilih muda. Data (primer dan sekunder) diperoleh dengan melakukan observasi; wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada sejumlah informan terpilih karena mengetahui, memahami, merasakan, dan sebagai pelaku/penyelenggara pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah; melakukan penelusuran data sekunder menyangkut pemilih muda; dan penelusuran pustaka/dokumen menyangkut pemilih muda.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dan sekunder yang diperoleh dianalisis setiap waktu sejak data itu diperoleh dilapangan dan seterusnya berlanjut dengan memadukan dengan berbagai data lainnya (triangulasi), dengan menggunakan alur berpikir Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan yang disertai dengan verifikasi data (Miles dan Huberman. 1992)

TINJAUAN TEORI

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu wujud dari berdaulatnya rakyat. Melalui Pemilu rakyat mendelegasikan kedaulatannya kepada segelintir orang yang memenuhi syarat untuk memegang tampuk kekuasaan, khususnya di bidang legislatif dan eksekutif melalui mekanisme pemilihan, sedemikian rupa, sesuai aturan, secara berkesinambungan, biasanya dalam kurun waktu sekali dalam lima tahun. Rakyat perlu mendelegasikan kedaulatannya di dalam memimpin, sebab tidak mungkin seluruh rakyat tampil sebagai pemimpin. Karena itu mereka perlu memilih pemimpin dari kalangan sendiri (rakyat) untuk mengendalikan Negara pada tiga cabang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada prinsipnya salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan demokrasi pada suatu Negara, adalah terselenggaranya Pemilu. Dalam konteks ini Pemilu tidak saja terselenggara, akan tetapi juga penyelenggaraannya memiliki kualitas, dalam pengertian berlangsung secara terbuka, jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia. Dalam pandangan Budiardjo, di kebanyakan Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambing, sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat (Miles dan Huberman. 1992)

Pemilih muda, biasanya agak abai dengan Pemilu, sehingga tingkat partisipasinya tidak sehebat dengan pemilih pada umumnya (rakyat yang telah berulang kali ikut berpartisipasi), sungguhpun bukan jaminan bahwa pemilih selain pemilih muda tingkat partisipasinya dipastikan tinggi. Pemilih muda, sejatinya, ikut menentukan keterpilihan pemimpin, baik di tingkat nasional maupun local, di dalam konteks legislative dan eksekutif. Oleh karena itu penting artinya memperhatikan penanganan pemilih muda ini dengan melakukan sosialisasi politik (pendidikan politik), sehingga mereka merasa bertanggung jawab dalam bentuk berpartisipasi sebagai pemilih pada setiap pelaksanaan Pemilu.

Sosialisasi politik, sesungguhnya adalah bentuk sosialisasi biasa di mana para warga, khususnya warga muda, mempelajari kebiasaan-kebiasaan politik dan nilai-nilai politik yang berlaku untuk kemudian menjadi patokan hidupnya di dalam melakoni kehidupan politik sebagai warga Negara. Alomnd (dalam Mas' oed dan MacAndrews. 1978) mengemukakan, Sosialisasi politik menunjuk pada proses-proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku. Di samping itu sosialisasi politik juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya. Dengan mengacu pada definisi ini, maka sosialisasi politik dapat pula dipandang sebagai transmisi kebudayaan.

Penanganan Pemilih Muda

Perkiraan jumlah pemilih muda 680.352 jiwa di Sulawesi Tengah, sebagian diantaranya tidak bersekolah, bersekolah di sekolah menengah atas, dan mereka sekarang yang sedang kuliah di perguruan tinggi negeri dan Swasta. BPS Sulawesi

Tengah mencatat, tahun 2012 jumlah mahasiswa di PTN sebanyak 28.000 orang, terdiri atas: mahasiswa Untad 26.000 orang dan STAIN Datokarama 2.000 orang. Sedangkan yang kuliah di perguruan tinggi swasta sebanyak 41.716 orang. Sehingga diperkirakan jumlah mahasiswa seluruhnya sebanyak 69.716.

Berdasarkan pengamatan lapangan dan hasil diskusi dengan Salah seorang Komisioner KPU Prov. Sulawesi Tengah dan Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sarat dengan masalah, terutama data dasar wajib pilih yang disiapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya mampu mencatat semua wajib pilih. Pengakuan Kepala Dinas Kependudukan Prov. Sulawesi Tengah menyebutkan, kendati pemerintah telah berusaha dengan susahpayah menertibkan data kependudukan melalui program KTP Elektronik. Akan tetapi faktanya masih banyak anggota masyarakat (termasuk pemilih muda) yang merupakan wajib pilih belum mendapatkan KTP Elektronik sebagai akibat berbagai masalah yang menyertai program tersebut. Sebagai akibatnya pemerintah juga mengalami kesulitan menyediakan data dasar wajib pilih yang faktual dan mampu merekam semua wajib pilih yang selanjutnya menjadi data dasar bagi Pantarlih (KPU) dalam melakukan verifikasi untuk kemudian menetapkan data wajib pilih yang akurat. Problem yang terjadi di Sulawesi Tengah, pihak yang paling rentan tidak terdata adalah pemilih muda, khususnya pemilih muda (pemilih yang baru pertama kali akan mengikuti Pemilu). Mereka itu, terutama yang bermukim diperdesaan terpencil, diperkotaan -- kaum miskin kota dan mereka yang masih menganggur -- serta sebagian yang bekerja di sektor informal. Bahkan siswa pada kelas akhir di level sekolah menengah dan mahasiswa juga tetap rentan terabaikan sehingga tidak tercatat sebagai wajib pilih (DPT). Mengapa demikian? Pemilih muda, jelas kurang memiliki pengalaman sebagai pemilih. Sebagai akibatnya, karena ketidak-tahuan tentang pentingnya hak konstitusional mereka sebagai rakyat yang berdaulat menetapkan pemimpin, maka boleh jadi mereka abai terhadap proses tahapan Pemilu, khususnya penetapan DPS dan DPT. Dengan demikian, jika mereka tidak mendapatkan perhatian khusus dari penyelenggara Pemilu, mereka terancam tidak dapat menggunakan hak politik saat Pemilu.

Membebankan tanggung jawab ini sepenuhnya terhadap penyelenggara Pemilu, sepertinya tidaklah tepat. Walaupun secara gamblang harus dinyatakan, jika banyak pemilih muda, khususnya pemilih muda, kehilangan hak pilih pada saatnya, maka pihak yang paling bertanggung jawab memang penyelenggara Pemilu. Akan tetapi hal yang juga penting disadsari adalah pihak yang mestinya juga ikut bertanggung jawab, adalah pemerintah, perguruan tinggi, Ormas, Orpol, orang tua/keluarga dan para pihak lainnya yang merupakan bagian dari masyarakat. Dengan cara dan metode pendekatan masing-masing mestinya semua pihak itu dapat mengambil peran membantu penyelenggara Pemilu sedemikian rupa sehingga pemilih muda dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab.

Pendidikan Politik Pemilih Muda

Pendidikan politik biasa pula disebut sosialisasi politik diartikan sebagai bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya (Almond dalam Mas'ood dan MacAndrews. 1978). Dalam konteks pemilih muda, pendidikan politik berarti bagaimana para pemilih muda itu diberi dan mendapatkan pemahaman berupa pengetahuan dan pengalaman menyangkut berbagai nilai-nilai politik mengenai Pemilu yang kemudian akan menuntunnya menjadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab. Berkaitan dengan hal itu mewujudkan pemilih muda cerdas dan bertanggung jawab sangat ditentukan oleh lingkungannya, antara lain: keluarga, sekolah (pendidikan), kelompok pergaulan, pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik langsung (Mas'ood dan MacAndrews. 1978). Agen pendidikan politik inilah yang seharusnya diberi peran dan tanggung jawab untuk memberi pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman menyangkut nilai-nilai pemilu demokratis kepada anak muda, sehingga pada saatnya mereka menjadi pemilih cerdas dan mampu mengawal keberlangsungan demokrasi secara sesungguhnya. Dalam pandangan Huntington (dalam Plattner, Marc F., Joao Carlos Espada. 2000) Pemilu yang bebas, jujur, dan kompetitif hanya dimungkinkan bila terdapat kebebasan berpendapat, berkumpul, dan pers, serta jika kandidat dan partai oposisi dapat melakukan kritik terhadap penguasa tanpa ketakutan akan terjadinya pembalasan. Kalangan anak muda (pemilih muda) inilah jika mendapatkan pendidikan politik yang baik, diharapkan dapat mewujudkan keberlangsungan proses Pemilu di dalam kerangka sistem politik demokratis sebagaimana harapan Huntington itu.

Faktanya, sebagaimana observasi (pengamatan) yang dilakukan selama penelitian, di Sulawesi Tengah agen pendidikan politik belum melaksanakan perannya secara memadai. Hal itu diakui oleh para tokoh masyarakat yang diwawancarai sehubungan dengan pelaksanaan penelitian ini. **Keluarga**, misalnya, perannya tampaknya makin jauh di dalam membentuk nilai-nilai politik anak muda. Mengapa demikian? Dari perbincangan sehari-hari dengan banyak kepala keluarga selama penelitian berlangsung, diketahui, umumnya kepala keluarga sibuk mencari nafkah, sehingga waktu untuk bertemu dengan anggota keluarga (khususnya anak-anak mereka), tidak banyak. Ditambah lagi oleh pemahaman, umumnya, kepala keluarga mengenai politik, juga kurang. Hal itu disebabkan transmisi nilai-nilai politik dari orang tua di masa lalu, kurang memadai. Sehingga jikapun mereka menularkan nilai-nilai politik kepada anggota keluarga, sangat mungkin, pengetahuan mengenai nilai itu sangat sedikit dan boleh jadi nilai yang diberikan itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya nilai Pemilu. Itulah sebabnya dalam praktek politik Pemilu di Sulawesi Tengah masih dominan terjadi politik uang, intimidasi, janji-janji kosong yang dengan mudah dipercayai oleh masyarakat.

Sekolah (pendidikan). Sebagai agen pendidikan politik, sekolah, antara lain pendidikan tinggi, sebetulnya dapat mengambil peran sebagai agen terdepan dalam menyalurkan nilai-nilai politik, khususnya menyangkut pemilu demokratis kepada pemilih muda, khususnya pemilih muda. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan

wawancara yang dilakukan dengan seorang akademisi dari FISIP-Untad diketahui, peran sekolah tidak signifikan dalam membentuk generasi muda yang paham politik dan mampu mengimplementasikannya sehingga mereka dapat menjadi pioner demokrasi yang mewujud di dalam proses Pemilu. Terutama pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, kurikulumnya begitu padat dengan nilai-nilai kehidupan ekonomi (materialism), sedangkan nilai-nilai etika, moral, dan tentu saja pemahaman-pemahaman mengenai politik, dirasakan sangat kurang. Sebagai akibatnya, susah sekali menemukan siswa yang fasih mengungkap apa sebetulnya nilai demokrasi dan politik yang beretika dan bermoral itu, serta bagaimana sesungguhnya proses Pemilu mesti dilakukan, dan bagaimana yang bersangkutan terlibat di dalam mewujudkan proses Pemilu beretika dan bermoral. Pemahaman yang sama juga bahkan terjadi dikalangan mahasiswa. Padahal mahasiswa dan perguruan tinggi di mana mereka menimba ilmu mestinya menjadi agen utama atas hadirnya pembaharuan, antara lain bertanggung jawab terhadap hadirnya proses Pemilu cerdas yang kemudian menghadirkan demokrasi yang terkonsolidasi.

Lingkungan pergaulan dan pekerjaan, berdasarkan pengamatan (observasi) dilapangan dan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat diketahui lingkungan pekerjaan dan pergaulan, juga belum mampu mencerahkan para anak muda itu. Pergaulan mereka, karena perkembangan jaman dengan penekanan pada materialisme, menghasilkan lingkungan yang juga materialistik. Budaya yang sarat dengan nilai-nilai tradisi ketimuran yang baik terhadap perkembangan demokrasi, terasa mulai ditinggalkan. Muncul dan marak budaya baru, berupa: perilaku hedonisme, konsumtif, gaya hidup kebarat-baratan, dan meninggalkan nilai-nilai tradisi yang sesungguhnya kompatibel dengan demokrasi seperti: etika, moral, penghargaan terhadap orang lain, musyawarah, gemar menolong (gotong royong), dan berbagai nilai tradisi lainnya. Lingkungan pergaulan dan pekerjaan ini *reciprocal* (saling mempengaruhi) dengan lingkungan keluarga dan pendidikan. Nilai yang didapat di dalam keluarga dan sekolah juga dibawa ke lingkungan pergaulan dan pekerjaan. Demikian sebaliknya. Sehingga jika dilakukan perbaikan di dalam keluarga dan sekolah, sesungguhnya dapat mengubah lingkungan pergaulan dan pekerjaan. Demikian sebaliknya.

Media massa, dipastikan sebagai agen perubahan social yang paling berperan, bahkan secara massif, memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai nilai-nilai politik kepada masyarakat, khususnya kalangan pemilih muda. Menurut seorang tokoh masyarakat yang diwawancarai sehubungan dengan pelaksanaan penelitian ini diperoleh informasi bahwa sayang sekali peran media massa ini terkadang justru dirasakan tidak mencerahkan, akan tetapi justru menjejali para anak muda itu dengan berita dan ulasan-ulasan mengenai kekerasan politik, kesalahan pengelolaan Negara seperti korupsi, politik dinasti, dan lain-lain. Tentu saja media massa menyajikan semua itu dengan maksud memberi pencerahan dan pendidikan politik, akan tetapi seringkali penyajiannya terlalu atraktif sehingga sisi negatifnya yang menonjol, sedangkan sisi edukasinya menjadi tersamar. Inilah mungkin sisi gelap dari euphoria kebebasan.

Kontak-ontak politik langsung yang dialami oleh pemilih muda di dalam kesehariannya, berdasarkan observasi, sungguhpun sekilas, diketahui kurang memberikan pengalaman politik yang baik. Kalangan anak muda di Sulawesi Tengah, harus diakui, banyak yang terlibat pada berbagai event politik, khususnya Pilkada, baik sebagai pemilih maupun sebagai tim sukses, bahkan sebagai penyelenggara. Menurut seorang tokoh Partai Politik yang diwawancarai sehubungan dengan pelaksanaan penelitian ini mengemukakan, di dalam aktifitas berupa kontak-kontak politik langsung itu, mereka (para anak muda) menyaksikan betapa event demokrasi yang bernama Pilkada itu, sudah menjadi rahasia umum, dikelola dengan menghalalkan segala cara. Praktek politik Pilkada seperti itu jelas menjadi pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman mereka yang boleh jadi diterapkan juga di dalam Pemilu 2014. Jika hal itu terjadi, lalu bagaimana nasib proses demokrasi bangsa ini di masa depan?

KESIMPULAN

Kualitas Pemilu 2014, salah satu penentunya adalah pemilih muda yang cerdas dan mampu mengimplementasikan etika dan moral politik di dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Sayang sekali agen pendidikan politik yang membentuk lingkungan pemilih muda itu belum mampu berperan secara memadai dalam proses transmisi nilai-nilai politik demokratis yang selanjutnya menghadirkan Pemilu bersih. Inilah tantangan Pemilu 2014.

Selanjutnya penanganan pemilih muda, juga belum dilaksanakan secara sesungguhnya. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu tampaknya belum dilakukan secara massif, terstruktur, dan terencana sehingga belum semua pemilih muda dapat memperoleh pencerahan. Dalam konteks Pemilu ini mestinya semua pihak merasa terpanggil dan ikut bertanggung jawab terhadap partisipasi pemilih muda ini. Sebab mereka sesungguhnya menjadi pihak penentu terpilihnya pemimpin nasional dan daerah yang berkualitas yang mampu membawa bangsa ini ke arah kemajuan.

SARAN

Berangkat dari kesimpulan yang dikemukakan di atas, dikemukakan saran/rekomendasi penelitian ini, yaitu pendidikan formal mulai tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi mestinya ikut bertanggung jawab memberikan pendidikan politik bagi pemilih muda. Lembaga pendidikan selain membentuk karakter bangsa dan membentuk calon pemimpin di masa depan, mestinya juga tampil sebagai pihak yang bertanggung jawab membentuk generasi yang mau berpartisipasi aktif sebagai pemilih di dalam segala bentuk Pemilu, khususnya Pemilu di tahun 2014.

Selanjutnya agen perubahan yang berada di masyarakat, seperti keluarga dan media massa harus secara massif memandang aktifitas sosialisasi politik dalam bentuk pendidikan pemilih, khususnya bagi generasi muda sebagai hal mulia, karena

aktifitas seperti ini lambat laun akan memperbaiki kualitas Pemilu dan kualitas pemimpin yang terpilih/ Lebih dari itu keterlibatan mereka akan menghasilkan demokrasi yang berkualitas dan terkonsolidasi.

Pemerintah dan penyelenggara Pemilu mestinya memiliki program pendidikan politik bagi pemilih muda yang jelas, tegas, massif, terencana, dan terstruktur. Sehingga aktifitas pendidikan politik bagi pemilih muda ini benar-benar dapat berhasil guna dan berdaya guna, tidak sekadar menggugurkan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Plattner, Marc F., Joao Carlos Espada (2000), *The Democratic Invention*, Baltimore: The John Hopkins University Press,
- Mas' oed, Mochtar dan Colin MacAndrews (1978). *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press
- Miriam, Budiardjo (1986), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Terj: Mulyarto. Jakarta. UI Press.
- BPS Sulawesi Tengah, (2012). *Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2012*.